

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

: Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah



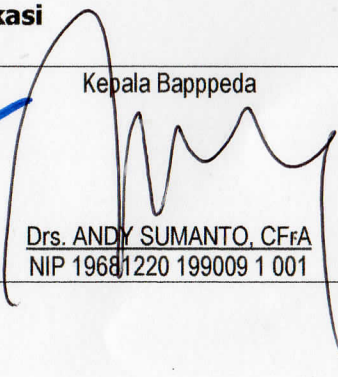
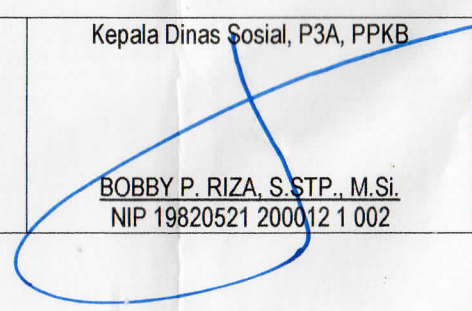
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>m : n Perencanaan ngunan Daerah</p> <p>n : nggaran bang RKPd</p> <p>: nggaranya bang daerah ten Dharmasraya</p>	<p>-Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan menggunakan pendekatan top down, bottom up, teknokratik, politis, aspiratif.</p> <p>-Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom up dan aspiratif</p> <p>-Kondisi saat ini pada RKPd tahun 2017 porsi terkait dengan isu-isu gender antara lain: disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin perempuan (janda), dll masih minim baik di BAB II, BAB IV dan BAB V.</p>	<p>Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan tidak menjangkau semua komponen masyarakat - Jadwal pelaksanaan Musrenbang disesuaikan dengan jadwal kepala daerah - Informasi pelaksanaan Musrenbang minim <p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi yang disajikan dan cara penyampaian materi belum komunikatif untuk seluruh komponen yang diundang. <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musrenbang hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan <p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porsi pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan top down dan politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola kegiatan belum responsif gender - Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan - Karena keterbatasan anggaran mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan substansi yang dibahas - Mindset perencana di Bappeda bahwa mengusulkan kegiatan yang baru diluar renstra tidak di perbolehkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi - Pelaksanaan kegiatan Musrenbang lebih mengutamakan seremonial dari pada substansi pembahasan - Tingkat kehadiran pemangku kebijakan/kepala SKPD minim - Makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan - Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah 	<p>Terwujudnya perencanaan yang responsif gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah - Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Dharmasraya - Implementasi sistem perencanaan - Bimbingan teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan - Penyusunan RKPd Tahun 2020 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan musrenbang tahun 2017 peserta yang hadir 200 orang. - Komposisi jenis kelamin 141 laki-laki dan 39 perempuan. - Komposisi elemen yang hadir pemerintah 148, swasta 5, masyarakat 48 (ormas dan LSM) - Tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan musrenbang tahun 2017 tidak ada. 	<p>Kegiatan 1: Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Input; Rp 184.035.000,-</p> <p>Output: Terlaksananya Foru SKPD dan Musrenbang RKPd Tahun 2018</p> <p>Outcome; Terakomodirnya dan sinkronnya usulan kegiatan nagari/ kecamatan dalam ke dalam dokumen RKPd 2018</p> <p>Kegiatan 2; Fasilitasi Pengarusutamaan Gender</p> <p>Input; Rp 75.000.000,-</p> <p>Output: Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Dharmasraya</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
				<ul style="list-style-type: none"> - Musrenbang belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk didukung oleh penganggaran yang maksimal - Domain politik dalam penyusunan penganggaran lebih dominan 				Outcome; Meningkatnya pemahaman Kepala Perangkat Daerah tentang Perencanaan Penganggaran berbasis Gender

KEPALA BAPPEDA

Drs. ANDY SUMANTO, CFA
 NIP 19681220 199009 1 001

Tim Verifikasi

Inspektur  <u>KANDAM, S.Sos</u> NIP 19670607 199103 1 004	Kepala BKD  <u>PARYANTO, S.Sos., M.T.</u> NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Bappeda  <u>Drs. ANDY SUMANTO, CFA</u> NIP 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB  <u>BOBBY P. RIZA, S.STP., M.Si.</u> NIP 19820521 200012 1 002
---	--	---	---